

RETRIBUSI –IZIN - MENDIRIKAN - BANGUNAN
2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 10, LD. 2012/ NO. 7 KAB. ACEH BESAR : 32 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN.

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan objek retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah perlu menciptakan keharmonisan kesesuaian biaya dalam menentukan tarif Retribusi, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 8 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 2 Tahun 1993, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Tata Cara Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pengelola Retribusi, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan

Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan Retribusi, Insentif
Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2012.
2011;